



## ETIKA POLITIK PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ERA GLOBALISASI

M. Nurwandi Nurdin, Muhammad Rais Rahmat Razak

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email: ([wandynr28@gmail.com](mailto:wandynr28@gmail.com)), ([mraisahmat@gmail.com](mailto:mraisahmat@gmail.com))

---

### Article Info

#### Keywords:

*Political ethics, fulfillment of human rights, globalization*

---

### Abstract

*Political ethics plays an important role in realizing human rights in the context of globalization. Globalization has connected countries and communities around the world and created opportunities to increase access to and protection of human rights. However, this phenomenon also raises ethical challenges in a complex global political landscape, and this article examines the role of political ethics in ensuring the realization of human rights in globalization. First, we discuss the principles of political ethics that should guide political policy and action in the context of globalization. It also analyzes various ethical issues that arise in human rights activities, such as cultural domination, economic inequality, and environmental problems. In conclusion, this article emphasizes the importance of international cooperation based on sound political ethics to face these challenges and facilitate the realization of human rights in the era of globalization.*

---

### A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin meningkat, isu hak asasi manusia (HAM) menjadi semakin kompleks dan relevan. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Dalam konteks ini, etika politik berperan penting dalam menjamin terwujudnya hak asasi manusia dalam dinamika globalisasi (Nasution 2017).

Etika politik berkaitan dengan prinsip dan nilai moral yang memandu tindakan dan perilaku politik baik di tingkat nasional maupun internasional (Diana,

Masruri, and Surwandono 2018). Dalam konteks pembelaan hak asasi manusia, etika politik merupakan landasan moral bagi para pemimpin politik, organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk bertindak adil dengan bermartabat dan bertanggung jawab serta untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Di era globalisasi, kehidupan manusia menjadi semakin kompleks akibat peningkatan arus perdagangan internasional, pertukaran budaya, dan mobilitas manusia (Ngafifi 2014). Fenomena ini menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi perwujudan hak asasi manusia, sedangkan globalisasi berpotensi memperluas peluang akses pendidikan, kesehatan, dan teknologi yang meningkatkan taraf hidup manusia. Namun, pada saat yang sama, globalisasi dapat memperdalam ketidaksetaraan, memperburuk eksploitasi manusia, dan mengancam hak-hak dasar individu. Etika politik dalam realisasi hak asasi manusia membutuhkan upaya bersama dari Negara, organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk mengembangkan kerangka hukum yang melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dalam konteks globalisasi, prinsip-prinsip universal seperti kesetaraan, keadilan, martabat, dan kebebasan harus mendasari semua kebijakan dan semua tindakan politik.

Etika politik juga menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam institusi politik dalam dan luar negeri. Para pemimpin politik dan lembaga pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia. Selain itu, masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan secara vokal memantau dan berbicara menentang pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia (Nasution 2017).

## **B. LITERATURE REVIEW**

### **A. Prinsip-prinsip etika politik dalam konteks globalisasi**

Terdapat beberapa prinsip etika politik yang perlu menjadi pedoman kebijakan dan tindakan politik untuk menjamin terwujudnya hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya prinsip kesetaraan

menekankan bahwa semua orang memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin atau latar belakang sosial ekonomi. Dalam konteks globalisasi, prinsip ini menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang di dunia. Kebijakan politik harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu (Setiawan and Fauzi 2019).

Prinsip keadilan membutuhkan pemerataan sumber daya dan kesempatan pada skala global. Kebijakan politik harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua orang, terutama yang rentan dan tidak berdaya. Upaya harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara dan di dalam negara. Prinsip keadilan juga mencakup perlindungan hak individu yang diabaikan atau dilanggar oleh kekuatan ekonomi dan politik yang dominan.

Prinsip Martabat menekankan bahwa semua manusia memiliki nilai yang melekat dan hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan bermartabat. Dalam konteks globalisasi, kebijakan politik harus memastikan tidak terjadi pelanggaran harkat dan martabat manusia, seperti eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap migran dan pengungsi. Prinsip ini menekankan perlunya melindungi kehidupan, kesehatan fisik dan psikologis individu.

Prinsip Kebebasan menekankan pentingnya hak individu atas kebebasan berpikir, berekspresi, berkumpul dan beragama. Kebijakan harus melindungi kebebasan sipil dan politik dan melindungi individu dari campur tangan yang tidak sah terhadap hak-hak tersebut. Di era globalisasi, prinsip kebebasan juga menyangkut hak individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat global.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi menuntut pemerintah dan lembaga politik untuk bertanggung jawab kepada publik dan masyarakat

sipil. Kebijakan harus transparan dan membutuhkan partisipasi publik yang setara. Prinsip ini juga termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan dan tindakan yang diambil. Pemerintah dan lembaga politik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tunduk pada kritik dan pengawasan oleh masyarakat sipil dan lembaga independen.

Selain prinsip-prinsip tersebut, etika politik dalam konteks globalisasi juga harus memperhatikan prinsip solidaritas, kelestarian lingkungan, dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Solidaritas menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan antar negara untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan pandemi. Prinsip Kelestarian Lingkungan menekankan perlunya kebijakan politik yang berkelanjutan dan memperhatikan dampak lingkungan dari semua tindakan. Di sisi lain, prinsip penghormatan terhadap keragaman budaya menekankan pentingnya menghormati dan menjaga identitas budaya masyarakat di tengah arus globalisasi.

#### B. Masalah etika yang muncul dalam kegiatan hak asasi manusia

Kegiatan HAM memunculkan beberapa isu etis yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam konteks globalisasi. Tiga isu utama yang sering menjadi sorotan adalah keunggulan budaya, globalisasi telah mempercepat pertukaran budaya antara bangsa yang berbeda di seluruh dunia. Namun, ada risiko dominasi budaya, di mana budaya yang lebih kuat secara ekonomi atau politik dapat digantikan atau diasimilasi oleh budaya yang lebih lemah. Masalah etika muncul ketika minoritas dan budaya tradisional ditekan atau dipadamkan oleh dominasi budaya yang kuat. Prinsip etika yang relevan dalam hal ini adalah menghormati keragaman budaya, menghormati semua budaya dan memastikan keberlanjutannya. Dalam kegiatan hak asasi manusia, penting untuk memastikan bahwa hak budaya dan identitas budaya dihormati dan dilindungi.

Ketimpangan ekonomi, globalisasi dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi antara dan di dalam negara. Beberapa individu dan kelompok kaya dan berkuasa berisiko memonopoli sumber daya dan mengabaikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Persoalan etika muncul ketika ketimpangan ekonomi ini berujung pada pelanggaran hak asasi manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Prinsip etika dasar kami adalah keadilan, dan kami berkomitmen untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi serta memastikan akses yang adil dan setara ke sumber daya dan peluang untuk semua.

Masalah lingkungan, di era globalisasi, masalah lingkungan menjadi lebih serius dan berdampak besar pada hak asasi manusia. Perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan degradasi lingkungan lainnya mengancam kehidupan dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Masalah etika muncul ketika aktivitas manusia, termasuk kondisi ekonomi dan industri, tidak menghormati kewajiban mereka terhadap lingkungan dan hak generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan (Rusdiyanto 2015). Prinsip etika terkait adalah kelestarian lingkungan, yang menekankan perlunya kebijakan dan tindakan yang mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kepustakaan kualitatif yang berfokus pada karya-karya seperti buku dan majalah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memuat data deskriptif dari literatur yang dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan proses atau makna (perspektif tematik) yang diutamakan dalam penelitian kualitatif.

Pengumpulan data adalah langkah pertama yang sangat dibutuhkan. Pengumpulan data penelitian dapat melibatkan pemilihan, pengumpulan, penyebaran dan analisis jenis data warisan yang sama yang digunakan dalam penelitian perpustakaan. Panduan untuk penelitian ini juga mencakup penulisan

uninformed review dan uji empiris, yang harus dilakukan secara filosofis dan teoritis secara ketat, dan karenanya perlu ditangani secara jelas dan sistematis Mencari informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku dan jurnal yang memaparkan atau mendeskripsikan kebijakan, anti kolusi, dan administrasi pemerintahan, serta menatanya sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dipilih, dicatat, dianalisis, dan diolah.

#### **D. HASIL DAN DISKUSI**

Etika politik bagi perwujudan hak asasi manusia di tengah arus globalisasi menjadi tema yang sangat penting di zaman modern ini. Dalam konteks globalisasi, di mana negara-negara semakin saling terhubung dan saling bergantung, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab bersama semua negara dan pemerintah.

Salah satu prinsip utama etika politik adalah prinsip keadilan. Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Dalam kehidupan global di mana individu dan kelompok dari budaya dan negara yang berbeda berinteraksi, prinsip keadilan ini penting untuk ditegakkan agar hak asasi manusia semua orang dihormati dan dijamin. Selanjutnya, etika politik dalam perwujudan hak asasi manusia juga mencakup prinsip partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal. Dalam kehidupan globalisasi, keputusan-keputusan politik yang mempengaruhi perwujudan hak asasi manusia seringkali melibatkan banyak pihak, antara lain masyarakat sipil, LSM, dan organisasi hak asasi manusia. Penting bagi pemerintah untuk memastikan partisipasi publik dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan ruang kritik dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang mungkin melanggar hak asasi manusia.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip politik dan etika yang penting dalam realisasi hak asasi manusia. Dalam konteks globalisasi, di mana aktivitas ekonomi dan politik menjadi semakin kompleks dan saling terkait, penting bagi pemerintah dan organisasi internasional untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab. Ini termasuk memberikan warga negara akses yang adil ke

informasi, menerapkan proses manajemen yang efektif, dan menghukum keras pelanggaran hak asasi manusia. Melalui transparansi dan akuntabilitas, pelanggaran hak asasi manusia dapat diungkap dan diambil tindakan yang tepat.

Kerjasama internasional juga merupakan elemen penting dari etika politik bagi perwujudan hak asasi manusia dalam konteks globalisasi. Masalah dan keprihatinan hak asasi manusia seringkali melampaui batas negara dan membutuhkan tanggapan terkoordinasi dari komunitas internasional. Negara harus bekerja sama untuk mengembangkan kerangka hukum dan mekanisme yang efektif untuk melindungi hak asasi manusia dan saling mendukung dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di negara lain.

#### **E. KESIMPULAN**

Etika politik berperan penting dalam mewujudkan hak asasi manusia dalam konteks globalisasi. Di era globalisasi di mana batas-batas menjadi semakin kabur, kebijakan pemerintah memiliki implikasi yang luas dan mendalam terhadap hak asasi manusia global.

Etika politik dalam perwujudan hak asasi manusia menuntut pemerintah dan pemimpin politik untuk mengajukan prinsip-prinsip universal seperti martabat manusia, keadilan, kesetaraan, kebebasan dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia baik dalam hubungan domestik maupun internasional.

Dalam globalisasi, etika politik juga membutuhkan kerjasama antar bangsa untuk menyelesaikan persoalan HAM. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah seperti perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, rasisme, dan penindasan politik. Kerja sama internasional melalui organisasi seperti

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi hak asasi manusia lainnya penting untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia.

Etika politik juga mencakup akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Para pemimpin politik harus bertanggung jawab kepada publik atas tindakan mereka dan memastikan bahwa publik berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Kebebasan berekspresi, kebebasan pers dan kebebasan informasi adalah elemen kunci dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dalam konteks globalisasi. Secara keseluruhan, etika politik yang menghargai hak asasi manusia sangat penting untuk menjamin kehidupan yang adil dan bermartabat di era globalisasi. Pemerintah dan pemimpin politik memiliki tanggung jawab moral untuk memprioritaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kebijakan dan tindakan mereka, dan bekerja dengan negara lain untuk mengatasi tantangan hak asasi manusia global.



## DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Rashda, Siswanto Masruri, and Surwandono Surwandono. 2018. "Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi." *Tsaqafah* 14(2):363. doi: 10.21111/tsaqafah.v14i2.2433.
- Nasution, Robby Darwis. 2017. "Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21(1):30–42.
- Ngafifi, Muhamad. 2014. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2(1):33–47. doi: 10.21831/jppfa.v2i1.2616.
- Rusdiyanto. 2015. "MASALAH LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI Rusdiyanto." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6(Desember):215–27.
- Setiawan, Anang, and Erinda Alfiani Fauzi. 2019. "Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 1(1):1–12. doi: 10.18196/jpk.v1i1.7614.